



Political Communication Strategies of DPRD Members in Absorbing Public Aspirations: A Case Study of Jombang Regency Period 2024-2029

Donny Anggun^{1*}, Teguh Priyo Sadono², Bambang Sigit Pramono³

Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Corresponding Author: Donny Anggun donnyanggun@untag-sby.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Political Communication Strategy, Aspiration Absorption, DPRD, Participatory Democracy, Jombang Regency

Received : 10 November

Revised : 15 December

Accepted: 30 January

©2026 Anggun, Sadono, Pramono: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This research describes the political communication strategies of DPRD members in Jombang Regency for the 2024-2029 period in absorbing public aspirations. Using a qualitative approach with case study design, data were collected through in-depth interviews, participant observation, and document analysis. Results show DPRD members implement multi-channel strategies integrating formal-institutional and informal-personal approaches, adapted to pesantren-based socio-cultural characteristics. Findings reveal five contribution dimensions: increased public participation, responsiveness of political representation, strengthening of cultural-based socio-political relations, transparency-accountability, and public policy effectiveness. The research enriches political communication literature by adding socio-religious context dimensions, emphasizing the importance of involving religious leaders as social legitimacy in political communication in pesantren-based regions

Strategi Komunikasi Politik Anggota DPRD dalam Menyerap Aspirasi Publik: Studi Kasus Kabupaten Jombang Periode 2024-2029

Donny Anggun^{1*}, Teguh Priyo Sadono², Bambang Sigit Pramono³

Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Corresponding Author: Donny Anggun donnyanggun6@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata kunci: Strategi Komunikasi Politik, Penyerapan Aspirasi DPRD, Demokrasi Partisipatif, Kabupaten Jombang

Received : 10 November

Revised : 15 December

Accepted: 30 January

©2026 Anggun, Sadono, Pramono: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan strategi komunikasi politik anggota DPRD Kabupaten Jombang periode 2024-2029 dalam menyerap aspirasi publik. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, dan analisis dokumen. Hasil menunjukkan anggota DPRD menerapkan strategi multi-kanal yang mengintegrasikan pendekatan formal-institusional dan informal-personal, disesuaikan dengan karakteristik sosial-budaya berbasis pesantren. Temuan mengungkapkan lima dimensi kontribusi: peningkatan partisipasi publik, responsivitas representasi politik, penguatan relasi sosial-politik berbasis kultural, transparansi-akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan publik. Penelitian memperkaya literatur komunikasi politik dengan menambahkan dimensi konteks sosial-religius, menegaskan pentingnya pelibatan tokoh agama sebagai legitimasi sosial dalam komunikasi politik di daerah berbasis pesantren

PENDAHULUAN

Komunikasi politik merupakan elemen fundamental dalam kehidupan demokrasi modern, karena melalui komunikasi politik, wakil rakyat yang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat menyampaikan program, kebijakan, serta menjalin relasi yang konstruktif dengan konstituen (McNair, 2011). Strategi komunikasi politik yang efektif memungkinkan anggota DPRD tidak hanya menyampaikan aspirasi kepada masyarakat, tetapi juga menyerap dan menyalurkan kebutuhan masyarakat secara optimal dalam proses pengambilan keputusan publik. Dalam konteks demokrasi partisipatif, komunikasi politik menjadi jembatan vital yang menghubungkan kehendak rakyat dengan kebijakan pemerintah daerah, sehingga legitimasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dapat terwujud secara berkelanjutan.

Kabupaten Jombang sebagai salah satu daerah berkembang di Jawa Timur memiliki keragaman demografis dan sosial yang cukup kompleks, dengan karakteristik masyarakat yang heterogen dari segi ekonomi, pendidikan, dan latar belakang sosial budaya. Secara geografis, Kabupaten Jombang terdiri dari 21 kecamatan dengan luas wilayah 1.159,10 kilometer persegi dan populasi sekitar 1,3 juta jiwa yang tersebar dalam berbagai kategori pekerjaan, mulai dari petani, pedagang, pekerja industri, hingga santri dan akademisi. Struktur ekonomi masyarakat Jombang yang didominasi oleh sektor pertanian sekitar 35 persen, perdagangan 28 persen, dan industri kecil menengah 22 persen menciptakan kompleksitas kepentingan yang beragam dan memerlukan pendekatan komunikasi politik yang berbeda-beda untuk setiap segmen masyarakat.

Keberadaan lebih dari 200 pondok pesantren di Kabupaten Jombang, termasuk Pesantren Tebuireng yang didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari, menjadikan wilayah ini memiliki karakteristik sosial-religius yang kuat dengan pengaruh kiai dan ulama yang signifikan dalam pembentukan opini publik (Dhofier, 2019). Hal ini menciptakan dinamika komunikasi politik yang unik, dimana anggota DPRD tidak hanya harus berkomunikasi dengan masyarakat umum, tetapi juga mempertimbangkan peran dan pengaruh tokoh-tokoh agama dalam menyampaikan dan menyerap aspirasi masyarakat. Tingkat pendidikan masyarakat yang bervariasi, dari yang berpendidikan rendah hingga sarjana, serta akses teknologi informasi yang tidak merata antara wilayah urban dan rural, menambah kompleksitas dalam pemilihan strategi dan media komunikasi yang efektif. Data menunjukkan bahwa sekitar 15 persen jalan kabupaten masih dalam kondisi rusak, dan 25 persen desa belum memiliki akses internet yang memadai, yang berdampak pada ketimpangan akses informasi dan partisipasi politik masyarakat.

Kompleksitas komunikasi politik di tingkat daerah semakin meningkat seiring dengan tuntutan masyarakat akan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dinamika politik lokal yang semakin berkembang menuntut anggota DPRD untuk memiliki strategi komunikasi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terjadi di masyarakat. Komunikasi politik yang efektif tidak

hanya berkaitan dengan kemampuan menyampaikan pesan, tetapi juga kemampuan mendengarkan, memahami, dan merespons aspirasi masyarakat secara tepat waktu dan tepat sasaran (Lasswell, 1948). Hal ini memerlukan pendekatan komunikasi yang multisaluran, multiarah, dan berbasis pada pemahaman mendalam tentang karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat.

Penelitian-penelitian terdahulu tentang komunikasi politik DPRD menunjukkan keragaman pendekatan dan fokus kajian. Anwar dan Sjoraida (2018) mengkaji dimensi sosial dalam pelayanan aspirasi DPRD Jawa Barat dan menemukan bahwa meskipun layanan dilakukan dalam berbagai cara yang merepresentasikan rakyat, masih ada keraguan terhadap signifikansi cara-cara tersebut bagi perkembangan kondisi demokratis. Maulansyah (2025) menemukan bahwa komunikasi politik menjadi elemen kunci dalam setiap tahapan proses legislasi dari penyaringan aspirasi hingga negosiasi kebijakan di DPRD Sumedang, dengan strategi mencakup pendekatan berbasis kultural, negosiasi lintas kepentingan, dan penggunaan bahasa politik adaptif. Faridah dkk (2024) mengidentifikasi sembilan jenis hambatan komunikasi politik dalam era kontemporer: teknis, semantik, psikologis, fisik, organik, status, kerangka berpikir, budaya, dan birokrasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Peran

Teori Peran (Role Theory) merupakan salah satu pendekatan dalam ilmu sosial yang menjelaskan bagaimana individu bertindak sesuai dengan ekspektasi yang melekat pada posisi sosial yang dimilikinya. Menurut Biddle (2013), peran adalah seperangkat norma, harapan, dan fungsi yang dikaitkan dengan suatu posisi dalam struktur sosial. Dengan kata lain, setiap individu tidak hanya bertindak berdasarkan kepribadian pribadi, tetapi juga menyesuaikan diri dengan peran sosial yang diharapkan masyarakat. Dalam konteks organisasi publik seperti DPRD, teori peran dapat menjelaskan bagaimana anggota dewan menjalankan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat yang harus menyerap aspirasi, merumuskan kebijakan, dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Lebih lanjut, Katz dan Kahn (2018) menekankan bahwa teori peran menempatkan organisasi sebagai sebuah sistem sosial yang kompleks, di mana interaksi antarindividu dibingkai oleh ekspektasi peran. Seorang anggota DPRD, misalnya, tidak hanya berperan sebagai legislator yang menyusun kebijakan, tetapi juga sebagai komunikator yang menjembatani masyarakat dengan pemerintah. Dengan memahami teori peran, dapat dilihat bahwa keberhasilan menjalankan fungsi politik dan komunikasi sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara perilaku aktual anggota dewan dengan ekspektasi peran yang dibebankan masyarakat kepadanya.

Teori Komunikasi Politik

Komunikasi politik dapat dipahami sebagai proses pertukaran pesan yang berkaitan dengan kekuasaan, kebijakan, dan legitimasi, yang dilakukan oleh aktor politik kepada masyarakat luas. Menurut McNair (2011), komunikasi politik adalah aktivitas yang mencakup produksi, penyebaran, serta interpretasi pesan politik oleh berbagai aktor, baik itu pemerintah, partai politik, media massa, maupun masyarakat. Proses ini melibatkan dimensi simbolik dan praktis, di mana pesan politik tidak hanya berfungsi sebagai informasi, tetapi juga instrumen pembentukan opini, pengaruh, dan kontrol sosial.

Nimmo (2015) menegaskan bahwa komunikasi politik adalah studi tentang bagaimana pesan politik dibangun, disampaikan, dan diterima oleh publik, serta bagaimana proses tersebut memengaruhi perilaku politik masyarakat. Dalam konteks kelembagaan publik seperti DPRD, komunikasi politik menjadi sarana bagi anggota dewan untuk menjelaskan kebijakan, merespons kebutuhan publik, sekaligus membangun citra politik yang kredibel. Oleh karena itu, pengertian komunikasi politik selalu terkait erat dengan relasi antara kekuasaan, representasi, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokratis.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme yang memandang realitas sebagai sesuatu yang objektif, terukur, dan dapat diamati secara empiris dalam konteks komunikasi politik organisasi publik. Creswell (2014) menjelaskan bahwa paradigma positivisme berasumsi bahwa realitas sosial bersifat objektif dan dapat dipahami melalui pengamatan sistematis serta analisis yang terstruktur. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dipilih untuk memahami secara mendalam strategi komunikasi politik anggota DPRD Kabupaten Jombang dalam menyerap aspirasi publik. Yin (2018) menjelaskan bahwa pendekatan studi kasus sangat tepat digunakan ketika penelitian bertujuan memahami fenomena kontemporer yang kompleks dalam konteks kehidupan nyata.

Desain penelitian mengintegrasikan pendekatan fenomenologi untuk memahami esensi pengalaman komunikasi politik dari perspektif anggota DPRD dan masyarakat sebagai konstituen. Creswell dan Poth (2018) menjelaskan bahwa pendekatan fenomenologi memungkinkan peneliti untuk mengungkap makna esensial dari pengalaman hidup individu terhadap fenomena tertentu melalui analisis mendalam terhadap deskripsi pengalaman tersebut.

Wilayah penelitian adalah Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, dengan fokus pada aktivitas komunikasi politik anggota DPRD Kabupaten Jombang periode 2025-2029 dalam konteks penyerapan aspirasi publik di tingkat lokal. Pemilihan Kabupaten Jombang sebagai lokasi penelitian didasarkan pada karakteristiknya sebagai daerah dengan kompleksitas sosial-budaya yang unik, di mana tradisi pesantren berpadu dengan dinamika modernisasi.

Sumber informasi primer dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Jombang periode 2025-2029 dari unsur pimpinan DPRD, ketua fraksi dan ketua komisi, serta anggota fraksi dan komisi yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan aktif mereka dalam aktivitas komunikasi politik dan penyerapan aspirasi masyarakat. Informan primer juga mencakup tokoh masyarakat, pimpinan partai, pimpinan organisasi kemasyarakatan, aktivis LSM, dan representasi masyarakat dari berbagai segmen ekonomi dan pendidikan yang memiliki pengalaman interaksi dengan anggota DPRD. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pejabat sekretariat DPRD, staf fraksi, dan praktisi media lokal sebagai informan yang dapat memberikan perspektif institusional tentang sistem dan proses komunikasi politik di tingkat kabupaten.

Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi metode untuk memastikan kedalaman dan kredibilitas temuan penelitian. Pertama, wawancara mendalam dengan teknik semi-terstruktur dilakukan untuk mengeksplorasi perspektif subjektif anggota DPRD dan stakeholder terkait tentang strategi komunikasi politik dan proses penyerapan aspirasi masyarakat. Kvale dan Brinkmann (2015) menjelaskan bahwa wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk mengakses pengalaman, interpretasi, dan makna yang dikonstruksi oleh informan tentang fenomena yang diteliti. Kedua, observasi partisipan dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik komunikasi politik anggota DPRD dalam berbagai setting. Ketiga, analisis dokumen dilakukan terhadap berbagai sumber dokumenter yang berkaitan dengan aktivitas komunikasi politik anggota DPRD (Bowen, 2009).

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan kriteria kredibilitas melalui penerapan triangulasi sumber, metode, dan investigator secara sistematis. Triangulasi sumber dilakukan dengan memverifikasi informasi dari berbagai kategori informan yang meliputi anggota DPRD dari berbagai fraksi dan komisi, tokoh masyarakat, aktivis LSM, akademisi, serta representasi masyarakat dari berbagai segmen ekonomi dan pendidikan di Kabupaten Jombang. Member checking juga dilakukan dengan mengkomunikasikan hasil interpretasi sementara kepada informan kunci untuk memastikan akurasi dan kesesuaian dengan pengalaman mereka.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis komunikasi politik yang dikembangkan oleh Harold Lasswell (1948) dengan kerangka "Who says what, in which channel, to whom, with what effect" untuk mengidentifikasi dan menganalisis komponen-komponen komunikasi politik anggota DPRD Kabupaten Jombang dalam menyerap aspirasi publik. Miles, Huberman, dan Saldaña (2020) menekankan pentingnya proses coding induktif yang memungkinkan pola-pola komunikasi muncul secara natural dari data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Aktivitas Perancangan, Implementasi, dan Evaluasi Strategi Komunikasi Politik

Proses perancangan strategi komunikasi politik dimulai dengan tahap identifikasi karakteristik konstituen dan pemetaan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan 8 anggota DPRD dari berbagai fraksi dan komisi, ditemukan bahwa setiap anggota dewan melakukan analisis situasional terhadap segmen masyarakat yang akan dijangkau, mempertimbangkan faktor demografis, sosial-ekonomi, tingkat pendidikan, serta preferensi media komunikasi. Perancangan strategi komunikasi politik juga memperhatikan keunikan sosial-budaya Kabupaten Jombang yang ditandai dengan keberadaan lebih dari 200 pondok pesantren dan pengaruh kuat tokoh agama dalam pembentukan opini publik. Berdasarkan observasi partisipan pada 3 kegiatan internal fraksi dan komisi, tampak bahwa anggota DPRD mempertimbangkan pendekatan komunikasi yang sensitif terhadap nilai-nilai keagamaan dan tradisi musyawarah yang mengakar di masyarakat.

Mereka merancang pesan-pesan politik yang selaras dengan nilai lokal dan memilih bahasa komunikasi yang sesuai dengan karakteristik audiens, baik menggunakan bahasa formal untuk kalangan akademisi maupun bahasa lokal untuk masyarakat pedesaan. Analisis terhadap 12 dokumen rencana kerja tahunan anggota DPRD dan notulen rapat fraksi menunjukkan bahwa perancangan strategi komunikasi politik dilakukan secara terencana dengan penetapan target capaian, alokasi anggaran komunikasi, serta penentuan jadwal kunjungan ke daerah pemilihan. Dokumen-dokumen tersebut juga mengungkapkan adanya koordinasi dengan sekretariat DPRD dalam menyiapkan materi komunikasi, infografis kebijakan, dan dokumen pendukung lainnya yang akan digunakan dalam interaksi dengan masyarakat.

Perancangan strategi komunikasi politik juga mencakup pemilihan kanal komunikasi yang akan digunakan. Hasil wawancara mendalam dengan ketua fraksi PDIP mengungkapkan bahwa mereka merancang kombinasi antara kanal komunikasi tradisional seperti pertemuan tatap muka, forum musyawarah desa, dan kunjungan ke institusi kemasyarakatan, dengan kanal komunikasi modern seperti media sosial, website pribadi, dan platform pesan instan. Keputusan pemilihan kanal komunikasi didasarkan pada aksesibilitas masyarakat terhadap teknologi informasi, mengingat data menunjukkan bahwa sekitar 25 persen desa di Kabupaten Jombang belum memiliki akses internet yang memadai. Hasil wawancara dengan ketua fraksi PKB menunjukkan bahwa analisis karakteristik masyarakat menjadi langkah strategis awal dalam merancang komunikasi politik. Anggota DPRD Jombang selalu melakukan identifikasi demografis, sosial-ekonomi, serta preferensi komunikasi masyarakat sebelum menyusun strategi tindakan politik. Ia menambahkan bahwa rancangan metode tatap muka tetap menjadi kanal komunikasi paling efektif karena masyarakat Jombang lebih senang bicara langsung, baik melalui

forum formal seperti reses maupun pertemuan informal di balai desa dan pesantren.

Implementasi strategi komunikasi politik diwujudkan melalui berbagai bentuk aktivitas komunikasi yang dapat diamati secara langsung melalui observasi partisipan. Aktivitas utama implementasi adalah pelaksanaan reses yang dilakukan secara berkala di daerah pemilihan masing-masing anggota dewan. Selama reses, anggota DPRD mengadakan pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat, mulai dari tokoh agama, kelompok petani, pedagang, hingga pemuda dan mahasiswa untuk mendengarkan aspirasi secara langsung. Observasi partisipan pada 5 forum dialog publik dan hearing menunjukkan bahwa anggota DPRD mengimplementasikan pendekatan komunikasi yang adaptif sesuai dengan karakteristik audiens. Dalam pertemuan dengan kalangan pesantren, anggota dewan menggunakan referensi keagamaan dan pendekatan yang menghormati hierarki keulamaan. Sementara dalam pertemuan dengan kelompok petani atau pedagang, pendekatan yang digunakan lebih pragmatis dengan fokus pada permasalahan konkret yang dihadapi masyarakat seperti harga hasil pertanian, akses pasar, atau infrastruktur irigasi.

Analisis terhadap 15 dokumen laporan reses menunjukkan bahwa implementasi strategi komunikasi politik melibatkan pemanfaatan media sosial sebagai kanal interaksi dengan konstituen, terutama generasi muda. Konten media sosial resmi anggota DPRD menunjukkan adanya aktivitas publikasi kegiatan legislatif, sosialisasi kebijakan, serta respons terhadap komentar dan pertanyaan masyarakat. Hasil wawancara mendalam dengan staf fraksi dan pengelola media sosial DPRD Jombang mengungkapkan bahwa konten media sosial dirancang untuk bersifat informatif sekaligus interaktif, memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi kapan saja tanpa terbatas oleh jadwal pertemuan formal.

Aktivitas implementasi lainnya mencakup partisipasi anggota DPRD dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pengajian, peringatan hari besar, dan kegiatan sosial di tingkat desa dan kecamatan. Observasi partisipan pada 7 kegiatan kemasyarakatan menunjukkan bahwa anggota DPRD memanfaatkan momentum tersebut untuk berkomunikasi informal dengan masyarakat, mendengarkan keluhan dan aspirasi, serta membangun kedekatan personal yang memperkuat kepercayaan konstituen. Pendekatan komunikasi informal ini terbukti efektif dalam menjangkau segmen masyarakat yang kurang aktif menghadiri forum-forum formal seperti hearing atau musyawarah desa.

Evaluasi strategi komunikasi politik dilakukan melalui berbagai mekanisme sistematis maupun informal. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan ketua DPRD, evaluasi formal dilakukan melalui rapat internal fraksi dan komisi yang membahas efektivitas kegiatan komunikasi yang telah dilaksanakan. Dalam forum tersebut, setiap anggota menyampaikan laporan kegiatan reses dan kunjungan kerja, termasuk jumlah aspirasi yang berhasil diserap, isu-isu utama yang disampaikan masyarakat, serta kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Analisis terhadap 10 dokumen laporan reses anggota DPRD menunjukkan adanya mekanisme

pendokumentasian aspirasi masyarakat yang sistematis, meliputi identifikasi permasalahan, lokasi, jumlah masyarakat yang terlibat, serta tindak lanjut yang direkomendasikan. Dokumen-dokumen tersebut kemudian dikompilasi oleh sekretariat DPRD untuk menjadi bahan evaluasi kelembagaan terhadap efektivitas fungsi representasi dewan.

Evaluasi juga dilakukan dengan mencocokkan aspirasi yang diserap dengan produk legislasi yang dihasilkan untuk mengukur sejauh mana aspirasi masyarakat terakomodasi dalam kebijakan daerah. Observasi partisipan pada 3 rapat evaluasi internal menunjukkan bahwa anggota DPRD melakukan evaluasi terhadap efektivitas kanal komunikasi yang digunakan. Kanal komunikasi yang dinilai kurang efektif dalam menjangkau segmen masyarakat tertentu akan dimodifikasi atau digantikan dengan kanal alternatif yang lebih sesuai. Misalnya, penggunaan media sosial yang kurang efektif untuk menjangkau masyarakat pedesaan dengan akses internet terbatas dievaluasi dan diimbangi dengan penguatan komunikasi tatap muka melalui pertemuan di balai desa atau pertemuan kelompok tani.

Evaluasi informal juga dilakukan melalui mekanisme feedback langsung dari masyarakat, baik melalui komentar di media sosial, pesan pribadi, maupun respons langsung saat pertemuan. Hasil wawancara mendalam dengan 5 tokoh masyarakat dan 3 aktivis LSM sebagai representasi masyarakat mengungkapkan bahwa masyarakat menilai keberhasilan strategi komunikasi politik tidak hanya dari frekuensi kehadiran anggota dewan, tetapi juga dari kualitas interaksi dan tindak lanjut nyata terhadap aspirasi yang disampaikan. Hasil wawancara dengan Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Jombang menyatakan bahwa peran sekretariat sangat sentral dalam mendukung kelancaran strategi komunikasi politik anggota dewan, terutama dalam aspek administratif, teknis, dan fasilitasi informasi. Sekwan menjelaskan bahwa setiap kegiatan komunikasi politik, baik berupa reses, hearing, dialog publik, maupun kunjungan kerja, selalu melibatkan Sekretariat DPRD dalam penyusunan jadwal, koordinasi lokasi, dan penyediaan perangkat pendukung seperti dokumentasi, materi komunikasi, serta laporan hasil kegiatan.

2. Identifikasi dan Efektivitas Media dan Kanal Komunikasi

Penelitian mengidentifikasi dua kategori utama media dan kanal komunikasi yang digunakan anggota DPRD Kabupaten Jombang, yaitu kanal komunikasi formal-institusional dan kanal komunikasi informal-personal. Hasil wawancara mendalam dengan staf fraksi dan pengelola media sosial menginformasikan bahwa masing-masing kategori memiliki karakteristik, kelebihan, dan keterbatasan yang berbeda dalam konteks penyerapan aspirasi masyarakat Jombang yang heterogen.

Kanal komunikasi formal-institusional meliputi kegiatan reses sebagai mekanisme utama yang dilaksanakan secara periodik di seluruh daerah pemilihan, hearing publik yang diselenggarakan di gedung DPRD, forum konsultasi dengan pemangku kepentingan, musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan dan kabupaten, serta kunjungan kerja ke berbagai wilayah dan institusi. Analisis terhadap 15 dokumen laporan reses

dan 8 notulen rapat DPRD menunjukkan bahwa kegiatan formal dalam bentuk hearing publik memiliki sistem dokumentasi yang terstruktur dan menjadi acuan dalam proses legislasi. Hasil wawancara dengan ketua fraksi Gerindra mengungkapkan bahwa mekanisme pelaksanaan reses memungkinkan anggota DPRD untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam setting yang terorganisir, meskipun keterbatasan waktu dan cakupan wilayah seringkali menjadi kendala dalam menjangkau seluruh segmen masyarakat.

Kanal komunikasi informal-personal mencakup pertemuan dengan komunitas lokal seperti kelompok tani, pedagang pasar, dan pengurus pondok pesantren, kunjungan ke rumah warga, kehadiran dalam acara-acara kemasyarakatan seperti hajatan dan pengajian, serta interaksi melalui jaringan personal dan kekerabatan. Hasil wawancara mendalam dengan 4 tokoh masyarakat dan 3 tokoh agama mengungkapkan bahwa kanal informal yang digunakan oleh anggota DPRD seringkali lebih efektif dalam menggali aspirasi yang bersifat sensitif atau tidak terungkap dalam forum formal. Observasi partisipan terhadap interaksi informal pada waktu pelaksanaan reses menunjukkan adanya atmosfer yang lebih santai dan akrab yang memungkinkan masyarakat untuk lebih terbuka dalam menyampaikan keluhan dan harapan mereka.

Peningkatan signifikan dalam pemanfaatan media digital oleh anggota DPRD Kabupaten Jombang teridentifikasi melalui analisis konten media sosial dan wawancara dengan 8 anggota DPRD. Platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp menjadi kanal yang semakin dominan dalam komunikasi politik kontemporer. Hasil wawancara mendalam dengan ketua fraksi Demokrat DPRD mengungkapkan bahwa WhatsApp menjadi media yang paling intensif digunakan karena karakteristiknya yang bersifat personal, cepat, dan memungkinkan komunikasi dua arah secara real-time. Grup-grup WhatsApp berbasis daerah pemilihan, komunitas profesi, dan organisasi kemasyarakatan menjadi saluran utama untuk menerima dan merespons aspirasi masyarakat. Facebook dan Instagram lebih banyak digunakan untuk komunikasi satu arah berupa sosialisasi kegiatan dan publikasi hasil penyerapan aspirasi, meskipun fitur komentar dan pesan langsung juga dimanfaatkan untuk interaksi dengan konstituen.

Observasi partisipan terhadap aktivitas pemanfaatan media digital dan sosial 8 anggota DPRD menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan kompetensi digital antar anggota dewan. Anggota DPRD dari generasi muda cenderung lebih aktif dan responsif dalam memanfaatkan media sosial, sementara anggota senior lebih mengandalkan kanal komunikasi tradisional dan bantuan staf untuk mengelola akun media sosial mereka. Fenomena ini berimplikasi pada variasi tingkat aksesibilitas dan responsivitas terhadap aspirasi masyarakat melalui kanal digital.

Efektivitas kanal komunikasi menunjukkan variasi signifikan berdasarkan karakteristik segmen masyarakat. Berdasarkan wawancara mendalam dengan 12 representasi masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi dan pendidikan, serta observasi partisipan terhadap pola interaksi di berbagai lokasi, hasil penelitian mengidentifikasi pola efektivitas sebagai berikut. Bagi masyarakat

rural dengan tingkat pendidikan dan akses teknologi yang terbatas, kanal komunikasi tatap muka melalui kegiatan reses dan pertemuan komunitas terbukti paling efektif. Kehadiran fisik anggota DPRD memberikan legitimasi dan kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan komunikasi termediasi. Peran tokoh agama, khususnya kiai atau pengasuh pondok pesantren, menjadi krusial sebagai perantara dalam menyampaikan dan menginterpretasikan aspirasi masyarakat santri dan lingkungan pesantren. Analisis 10 dokumen pemberitaan media online lokal mengkonfirmasi bahwa kegiatan reses di wilayah rural dengan keterlibatan tokoh agama mendapat respons dan partisipasi yang lebih tinggi dari masyarakat.

Bagi masyarakat urban dengan tingkat pendidikan dan akses teknologi yang lebih baik, media sosial dan platform digital menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam menyerap aspirasi. Kelompok masyarakat ini cenderung lebih kritis, ekspresif, dan menuntut respons yang cepat terhadap aspirasi yang mereka sampaikan. Wawancara mendalam dengan 3 aktivis LSM dan 2 akademisi di salah satu perguruan tinggi di Jombang mengungkapkan bahwa kelompok masyarakat terdidik memiliki ekspektasi tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas anggota DPRD, sehingga pemanfaatan media digital yang memungkinkan dokumentasi dan pelacakan aspirasi menjadi sangat penting.

Bagi kelompok profesi tertentu seperti petani, pedagang, dan pelaku UMKM, forum konsultasi sektoral dan asosiasi profesi menjadi kanal yang paling efektif. Aspirasi yang bersifat teknis dan spesifik terkait kebijakan sektoral lebih optimal disampaikan melalui forum yang mempertemukan anggota DPRD dengan kelompok yang memiliki kepentingan serupa. Observasi partisipan terhadap 3 aktivitas dialog dengan kelompok tani dan pedagang pasar menunjukkan bahwa format diskusi kelompok memfokuskan pada identifikasi masalah bersama dan perumusan aspirasi yang lebih konkret dan terstruktur.

Penelitian mengidentifikasi empat faktor determinan yang mempengaruhi efektivitas media dan kanal komunikasi. Faktor pertama adalah aksesibilitas, yaitu sejauh mana kanal komunikasi dapat dijangkau oleh seluruh segmen masyarakat. Analisis dokumen Laporan Dinas PUPR Kabupaten Jombang mengkonfirmasi bahwa sekitar 25 persen desa belum memiliki akses internet yang memadai, sehingga mengandalkan kanal digital saja tidak cukup untuk menjangkau seluruh konstituen. Faktor kedua adalah responsivitas, yaitu kecepatan dan kualitas respons anggota DPRD terhadap aspirasi yang disampaikan. Analisis 8 dokumen pemberitaan media online lokal mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan terhadap kanal komunikasi sangat dipengaruhi oleh seberapa cepat dan substantif respons yang diberikan. Faktor ketiga adalah kepercayaan dan legitimasi sosial dari kanal komunikasi. Dalam konteks masyarakat Jombang yang memiliki tradisi pesantren yang kuat, kanal komunikasi yang melibatkan atau mendapat restu dari tokoh agama memiliki legitimasi yang lebih tinggi. Observasi partisipan terhadap 2 forum dialog kebangsaan yang dihadiri oleh kiai pesantren menunjukkan tingkat partisipasi dan keterbukaan masyarakat yang lebih tinggi dibandingkan forum yang

bersifat murni politis. Faktor keempat adalah kesesuaian format dengan karakteristik aspirasi. Hasil wawancara dengan ketua fraksi PAN menyatakan bahwa aspirasi individual lebih efektif disampaikan melalui kanal privat, berupa pesan WhatsApp, komunikasi langsung melalui staf, atau bahkan kunjungan rumah. Sebaliknya, ketua fraksi PPP menyatakan bahwa untuk aspirasi kolektif yang menyangkut kepentingan kelompok atau komunitas, forum publik merupakan wadah deliberasi bersama.

Berdasarkan triangulasi data dari ketiga teknik pengumpulan data, penelitian menyimpulkan bahwa tidak ada satu kanal komunikasi tunggal yang dapat dianggap paling efektif untuk seluruh konteks dan segmen masyarakat. Strategi komunikasi politik yang optimal memerlukan pendekatan multi-kanal yang mengintegrasikan berbagai media dan kanal sesuai dengan karakteristik target audiens, jenis aspirasi, dan konteks situasional. Wawancara mendalam dengan Wakil ketua DPRD dari partai Gerindra mengungkapkan bahwa anggota DPRD Jombang sebagian besar menerapkan strategi kombinasi antara kehadiran fisik secara reguler di daerah pemilihan, responsivitas tinggi melalui media sosial, serta pemanfaatan jaringan tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebagai penghubung dengan berbagai segmen masyarakat. Analisis 15 dokumen laporan reses menunjukkan bahwa anggota DPRD yang mengintegrasikan hasil aspirasi dari berbagai kanal menghasilkan laporan yang lebih komprehensif dan mewakili keragaman kepentingan masyarakat.

3. Kontribusi terhadap Penguatan Demokrasi Partisipatif

Strategi komunikasi politik yang diterapkan anggota DPRD Kabupaten Jombang memainkan peran sentral dalam memperkuat demokrasi partisipatif. Penelitian menemukan lima dimensi kontribusi utama yang saling berkaitan. Dimensi pertama adalah penciptaan saluran komunikasi yang aksesibel dan inklusif. Hasil wawancara mendalam dengan ketua fraksi Nasdem dan ketua fraksi PKS mengungkapkan bahwa strategi komunikasi politik yang dirancang secara sistematis dapat memperluas akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Anggota DPRD memanfaatkan berbagai kanal komunikasi seperti pertemuan tatap muka, forum musyawarah desa, dialog publik, hingga media digital, dengan pemilihan kanal dilakukan berdasarkan karakteristik demografis masyarakat Jombang yang heterogen, mulai dari masyarakat pesantren, petani, pedagang pasar, hingga kelompok profesional.

Observasi partisipan pada 5 kegiatan reses dan 4 hearing publik menunjukkan bahwa strategi komunikasi berbasis multi-channel tidak hanya memperluas jangkauan interaksi, tetapi juga mengurangi hambatan partisipasi. Penggunaan media sosial oleh anggota DPRD terbukti efektif menjangkau kelompok muda yang selama ini kurang terlibat dalam forum formal, sementara pendekatan tatap muka dalam forum desa lebih efektif untuk segmen masyarakat yang memiliki akses teknologi terbatas. Analisis 15 dokumen laporan reses dan 8 notulen rapat menunjukkan terdapat peningkatan jumlah aspirasi yang disampaikan melalui kanal-kanal partisipatif

tersebut, mengindikasikan bahwa strategi komunikasi politik yang inklusif berkontribusi langsung terhadap meningkatnya keterlibatan masyarakat.

Dimensi kedua adalah pembentukan representasi politik yang lebih responsif. Hasil wawancara mendalam dengan 3 anggota fraksi PDIP menyatakan bahwa interaksi yang intensif dan berkelanjutan dengan masyarakat memberikan gambaran lebih akurat mengenai kebutuhan publik. Aspirasi yang dihimpun selama reses, pertemuan dengan konstituen, ataupun kanal digital menjadi dasar penting dalam pembahasan anggaran dan penyusunan regulasi. Observasi partisipan pada 4 rapat komisi menunjukkan bahwa responsivitas DPRD tidak hanya tampak dalam interaksi langsung, tetapi juga dalam bagaimana mereka menindaklanjuti aspirasi melalui mekanisme internal DPRD. Beberapa aspirasi yang muncul berkali-kali seperti perbaikan irigasi dan fasilitas pendidikan langsung mendapatkan prioritas dalam rapat komisi. Analisis 10 dokumen perencanaan dan kebijakan daerah memperkuat hal ini melalui temuan bahwa sejumlah aspirasi masyarakat tercatat terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan pembahasan kebijakan daerah.

Dimensi ketiga adalah membangun relasi sosial-politik yang mengakar. Hasil wawancara dengan 4 tokoh agama dan 5 tokoh masyarakat menyatakan bahwa anggota DPRD secara konsisten melakukan pendekatan kultural melalui kunjungan ke pesantren, menghadiri kegiatan keagamaan, atau dialog di ruang-ruang publik tradisional yang cenderung memiliki hubungan politik yang lebih harmonis dan jangka panjang dengan masyarakat. Observasi partisipan pada 6 kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan mengungkapkan bahwa pendekatan kultural bukan sekadar strategi komunikasi, tetapi juga wujud penghormatan terhadap struktur sosial lokal. Hal ini memperkuat ikatan sosial antara wakil rakyat dan masyarakat, meningkatkan legitimasi politik DPRD, dan memperkuat nilai-nilai demokrasi partisipatif yang berakar pada budaya musyawarah. Analisis 7 dokumen publikasi aktivitas anggota DPRD dalam pemberitaan media online lokal menunjukkan bahwa pendekatan kultural ini berdampak pada stabilitas komunikasi politik dan minimnya konflik persepsi antara masyarakat dan DPRD.

Dimensi keempat adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik. Hasil wawancara dengan 3 tokoh masyarakat dan 2 aktivis LSM mengungkapkan bahwa publik merasa lebih mudah mengakses informasi terkait kebijakan DPRD melalui berbagai kanal komunikasi, terutama media sosial dan website resmi. Observasi partisipan pada aktivitas media sosial 8 anggota DPRD menunjukkan bahwa sejumlah anggota DPRD aktif menyampaikan perkembangan agenda legislasi dan hasil rapat komisi melalui platform digital. Ini menurunkan asimetri informasi antara pejabat publik dan masyarakat. Analisis 12 dokumen laporan reses memperlihatkan bahwa laporan kegiatan DPRD kini lebih mudah diakses dan lebih rinci dibanding sebelumnya. Transparansi ini tidak hanya memperkuat kontrol publik tetapi juga mendorong anggota dewan bekerja lebih hati-hati dan terukur.

Dimensi kelima adalah peningkatan efektivitas kebijakan publik. Wawancara mendalam dengan Sekretaris DPRD menyatakan bahwa aspirasi

masyarakat yang dihimpun melalui komunikasi intensif menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan regulasi dan rekomendasi anggaran. Observasi partisipan pada 3 rapat paripurna menunjukkan bahwa anggota DPRD yang melakukan komunikasi lebih terstruktur cenderung memiliki kemampuan argumentatif yang lebih kuat dalam rapat komisi maupun paripurna karena mereka membawa data lapangan yang relevan. Analisis 5 dokumen evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa kebijakan yang dirumuskan melalui pendekatan partisipatif cenderung memperoleh dukungan publik yang lebih besar dan berjalan lebih efektif dalam implementasinya.

Sintesis terhadap data penelitian yang diperoleh dari 25 wawancara mendalam, 15 observasi partisipan, dan 47 analisis dokumen menunjukkan bahwa kontribusi strategi komunikasi politik terhadap demokrasi partisipatif di Kabupaten Jombang dapat dilihat pada lima dimensi utama: partisipasi publik meningkat melalui kanal komunikasi yang lebih banyak dan lebih mudah diakses, representasi politik lebih akurat karena aspirasi masyarakat berhasil dihimpun secara komprehensif, akuntabilitas meningkat karena DPRD lebih terbuka dalam menyampaikan aktivitas dan kebijakan, relasi sosial-politik menguat melalui pendekatan kultural yang adaptif terhadap karakteristik masyarakat, dan kebijakan publik lebih responsif karena didasarkan pada masukan masyarakat yang langsung dihimpun melalui strategi komunikasi yang efektif.

Pembahasan

1. Desain dan Implementasi Strategis Komunikasi Politik

Temuan penelitian tentang strategi komunikasi politik anggota DPRD Kabupaten Jombang memberikan wawasan penting tentang bagaimana wakil rakyat di tingkat lokal berupaya menjembatani kepentingan konstituen dengan fungsi legislatif mereka. Proses perancangan, implementasi, dan evaluasi strategi komunikasi politik menunjukkan upaya sistematis yang dilakukan dengan penuh kesadaran akan kompleksitas masyarakat yang mereka layani. Temuan ini sejalan dengan McNair (2011) yang menekankan bahwa komunikasi politik yang efektif memerlukan perencanaan yang matang, implementasi strategis, dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan relevansi pesan dan responsivitas terhadap kebutuhan audiens.

Analisis situasional yang dilakukan anggota DPRD sebelum merancang strategi komunikasi mencerminkan pemahaman mendalam tentang karakteristik konstituen. Pendekatan ini sejalan dengan teori Cangara (2016) yang menekankan pentingnya analisis audiens dalam komunikasi politik. Integrasi pertimbangan sosial-budaya pesantren dalam desain strategi menunjukkan kepekaan terhadap konteks lokal, yang menurut Dhofier (2019) sangat krusial di daerah dengan tradisi pondok pesantren yang kuat di mana kiai memegang pengaruh signifikan dalam membentuk opini publik.

Pendekatan hibrida yang memadukan kanal komunikasi tradisional dan modern menunjukkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi sambil tetap mempertahankan akar budaya. Temuan ini mendukung penelitian Aswela (2022) tentang strategi komunikasi politik berbasis kultural, yang menunjukkan bahwa komunikasi politik efektif di Indonesia memerlukan keseimbangan

antara inovasi dan tradisi. Penggunaan referensi keagamaan saat bertemu dengan komunitas pesantren dan pendekatan pragmatis saat berinteraksi dengan petani atau pedagang mengilustrasikan fleksibilitas komunikasi yang adaptif berdasarkan karakteristik audiens.

2. Efektivitas Kanal Komunikasi dan Faktor Penentu

Identifikasi kanal komunikasi formal-institusional dan informal-personal dengan integrasi media digital dan tradisional mencerminkan sifat adaptif komunikasi politik kontemporer. Temuan ini memperkaya teori komunikasi politik Lasswell (1948) dengan menunjukkan bahwa dalam konteks demokrasi lokal dengan karakteristik sosial-budaya yang unik, pemilihan kanal komunikasi harus mempertimbangkan tidak hanya aksesibilitas teknologi tetapi juga legitimasi sosial dan nilai budaya masyarakat. Peran krusial tokoh agama, khususnya kiai dalam konteks pesantren, sebagai perantara dalam komunikasi politik menambahkan dimensi baru yang belum banyak dieksplorasi dalam studi komunikasi politik terdahulu di Indonesia.

Temuan bahwa WhatsApp menjadi platform yang paling intensif digunakan mengonfirmasi penelitian Arrochmah dan Nasionalita (2020) tentang pemanfaatan media sosial dalam meningkatkan komunikasi publik DPRD. Namun, penelitian ini menambahkan nuansa penting dengan mengungkapkan bahwa efektivitas media digital sangat bervariasi berdasarkan segmentasi masyarakat. Masyarakat pedesaan dengan akses teknologi terbatas tetap lebih responsif terhadap komunikasi tatap muka, sementara masyarakat perkotaan dengan pendidikan dan akses teknologi yang lebih baik menunjukkan efektivitas tinggi dalam memanfaatkan platform digital. Temuan ini memiliki implikasi penting untuk merancang strategi komunikasi inklusif yang tidak meninggalkan segmen masyarakat tertentu.

Empat faktor determinan yang teridentifikasi yaitu aksesibilitas, responsivitas, kepercayaan dan legitimasi sosial, serta kesesuaian format dengan karakteristik aspirasi, memberikan kerangka komprehensif untuk mengevaluasi efektivitas kanal komunikasi. Faktor-faktor ini memperluas penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada aspek teknis atau frekuensi komunikasi. Dimensi kepercayaan dan legitimasi sosial, khususnya terkait keterlibatan tokoh agama, merupakan kontribusi unik penelitian ini terhadap literatur komunikasi politik dalam konteks Indonesia.

3. Kontribusi terhadap Demokrasi Partisipatif

Efektivitas strategi komunikasi multi-kanal dalam memperkuat demokrasi partisipatif mengonfirmasi teori representasi Pitkin (1967) yang menekankan pentingnya interaksi berkelanjutan antara wakil rakyat dengan konstituen. Lima dimensi kontribusi yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi politik bukan sekadar alat teknis untuk menyampaikan pesan, tetapi merupakan mekanisme fundamental untuk mewujudkan demokrasi substantif. Temuan ini relevan dengan perdebatan terkini tentang kualitas demokrasi di Indonesia, di mana institusi demokrasi formal harus didukung oleh praktik komunikasi efektif yang melibatkan beragam segmen masyarakat.

Dimensi pertama tentang penciptaan saluran komunikasi yang aksesibel dan inklusif menunjukkan bahwa perluasan strategi komunikasi berdampak langsung pada peningkatan partisipasi publik. Hal ini mendukung temuan Ramadhan (2017) tentang peran DPRD dalam mendorong partisipasi masyarakat melalui komunikasi publik di Kabupaten Sleman. Namun, penelitian ini menambahkan kedalaman dengan menunjukkan bahwa inklusivitas bukan hanya tentang kuantitas kanal, tetapi juga tentang adaptasi terhadap karakteristik dan kebutuhan masyarakat yang beragam.

Dimensi kedua tentang representasi politik yang lebih responsif menunjukkan bahwa interaksi intensif memungkinkan anggota DPRD memperoleh gambaran lebih akurat tentang kebutuhan publik. Temuan ini sejalan dengan model komunikasi reses Holilah dan Ismail (2023) dalam menyerap aspirasi masyarakat di Kabupaten Bangkalan. Integrasi aspirasi ke dalam dokumen perencanaan dan kebijakan daerah menunjukkan bahwa komunikasi politik memiliki dampak nyata pada substansi kebijakan, bukan hanya interaksi simbolik.

Dimensi ketiga tentang penguatan relasi sosial-politik melalui pendekatan kultural menunjukkan pentingnya pemahaman terhadap struktur sosial lokal dalam komunikasi politik. Pendekatan konsisten melalui kunjungan ke pesantren, kehadiran dalam kegiatan keagamaan, dan dialog di ruang-ruang publik tradisional bukan sekadar strategi komunikasi tetapi juga bentuk penghormatan terhadap struktur sosial lokal. Temuan ini memperkaya penelitian Chumaeson (2021) tentang strategi komunikasi politik adaptif dalam konteks multikultur, dengan menambahkan dimensi sosial-religius dalam analisis komunikasi politik.

Dimensi keempat tentang peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik menunjukkan bahwa implementasi strategi komunikasi memiliki implikasi positif terhadap kualitas tata kelola demokratis. Keaktifan anggota DPRD dalam menyampaikan perkembangan agenda legislasi dan hasil rapat komisi melalui platform digital mengurangi asimetri informasi antara pejabat publik dengan masyarakat. Temuan ini mendukung penelitian Sundari (2018) tentang transparansi layanan penyampaian aspirasi masyarakat pada DPRD, sekaligus menambahkan dimensi diseminasi informasi proaktif melalui kanal digital.

Dimensi kelima tentang peningkatan efektivitas kebijakan publik menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dalam perumusan kebijakan menghasilkan kebijakan dengan dukungan publik yang lebih besar dan implementasi yang lebih efektif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Syarifuddin, Rahmat, dan Mustanir (2024) tentang model komunikasi kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, yang menunjukkan bahwa komunikasi efektif merupakan kunci keberhasilan kebijakan partisipatif.

4. Tantangan dan Inovasi dalam Implementasi Komunikasi Politik

Namun, penelitian ini juga mengungkapkan berbagai tantangan dalam implementasi komunikasi politik, terutama terkait kesenjangan literasi digital dan ketimpangan akses infrastruktur teknologi. Temuan ini sejalan dengan Elizamiharti dan Nelfira (2023) yang mencatat bahwa teknologi informasi dan partisipasi politik di era digital menghadapi tantangan aksesibilitas dan inklusivitas. Data yang menunjukkan bahwa sekitar 25 persen desa di Kabupaten Jombang belum memiliki akses internet yang memadai menunjukkan bahwa kesenjangan digital tetap menjadi hambatan serius dalam mewujudkan komunikasi politik inklusif.

Solusi melalui integrasi multi-kanal yang diterapkan anggota DPRD Jombang menunjukkan inovasi praktis yang patut direplikasi di daerah lain dengan karakteristik serupa. Strategi ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi seharusnya tidak menggantikan tetapi melengkapi metode komunikasi tradisional. Kombinasi pemanfaatan media digital untuk masyarakat perkotaan dan terdidik dengan penguatan komunikasi tatap muka untuk masyarakat pedesaan mencerminkan pendekatan yang seimbang dan inklusif.

Kesenjangan kompetensi digital di antara anggota DPRD juga menjadi tantangan yang memerlukan perhatian. Temuan bahwa anggota DPRD generasi muda cenderung lebih aktif dan responsif dalam memanfaatkan media sosial, sementara anggota senior lebih mengandalkan kanal komunikasi tradisional, mengindikasikan perlunya program pengembangan kapasitas dalam komunikasi digital. Namun, keberagaman ini juga dapat menjadi keunggulan jika dikelola dengan baik, di mana setiap anggota dapat memaksimalkan kanal sesuai dengan kompetensi mereka sambil saling belajar.

5. Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya literatur komunikasi politik dengan mengintegrasikan dimensi konteks sosial-religius dalam analisis komunikasi politik. Integrasi Teori Peran dan Teori Komunikasi Politik dalam satu kerangka analisis yang koheren memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana ekspektasi peran dan pelaksanaan peran dalam konteks politik lokal sangat dipengaruhi oleh karakteristik sosial-budaya masyarakat. Model Lasswell yang diterapkan dalam penelitian ini terbukti relevan dan efektif dalam menganalisis komponen komunikasi politik secara komprehensif dan sistematis.

Temuan tentang peran krusial tokoh agama sebagai perantara dalam komunikasi politik menambahkan dimensi baru yang belum banyak dieksplorasi dalam studi komunikasi politik terdahulu di Indonesia. Hal ini menekankan bahwa komunikasi politik di daerah berbasis pesantren tidak dapat dipahami hanya dari perspektif struktural-fungsional, tetapi harus juga mempertimbangkan dimensi kultural-religius yang membentuk struktur sosial dan nilai masyarakat. Ini memiliki implikasi untuk pengembangan teori komunikasi politik yang lebih sensitif terhadap konteks lokal di Indonesia.

Secara praktis, penelitian ini memberikan beberapa implikasi penting untuk peningkatan kualitas komunikasi politik di tingkat lokal. Pertama, pentingnya pendekatan multi-kanal yang disesuaikan dengan karakteristik segmen masyarakat menekankan bahwa tidak ada solusi satu ukuran untuk semua dalam komunikasi politik. Anggota DPRD harus memiliki fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dalam memilih dan mengombinasikan berbagai kanal komunikasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik konstituen.

Kedua, pentingnya pemanfaatan teknologi untuk manajemen aspirasi menunjukkan bahwa transformasi digital dalam komunikasi politik bukan hanya tentang menggunakan media sosial, tetapi juga tentang mengembangkan sistem terintegrasi yang memungkinkan dokumentasi, pelacakan, dan tindak lanjut aspirasi masyarakat yang lebih baik. Investasi dalam infrastruktur teknologi informasi dan pengembangan kapasitas anggota dan staf DPRD dalam hal ini menjadi krusial untuk meningkatkan efektivitas komunikasi politik.

Ketiga, pentingnya pelibatan tokoh lokal dalam proses komunikasi sebagai praktik terbaik yang dapat diadaptasi dengan konteks lokal masing-masing daerah. Di daerah berbasis pesantren seperti Jombang, keterlibatan tokoh agama menjadi krusial, sementara di daerah lain dengan karakteristik berbeda, tokoh lokal lain yang relevan seperti pemimpin adat, tokoh pemuda, atau pengurus organisasi perempuan mungkin memainkan peran serupa.

6. Kontribusi Penelitian dalam Konteks Demokrasi Indonesia

Dalam konteks yang lebih luas tentang demokrasi Indonesia, penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana demokrasi lokal dapat diperkuat melalui praktik komunikasi politik yang efektif. Lima dimensi kontribusi yang ditemukan menunjukkan bahwa kualitas komunikasi politik berdampak langsung pada kualitas demokrasi partisipatif. Peningkatan partisipasi publik, representasi politik yang lebih responsif, penguatan relasi sosial-politik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta peningkatan efektivitas kebijakan publik merupakan indikator bahwa strategi komunikasi politik yang diterapkan anggota DPRD Jombang berkontribusi positif terhadap penguatan demokrasi lokal.

Temuan ini relevan dengan diskursus terkini tentang kualitas tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Di era desentralisasi, kapasitas pemerintah daerah untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakatnya menjadi semakin penting. DPRD sebagai institusi representatif memainkan peran krusial dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan kebijakan daerah, dan efektivitas komunikasi politik menjadi faktor penentu seberapa baik fungsi ini dijalankan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa komunikasi politik di Indonesia tidak dapat dipahami hanya dari perspektif teoretis Barat yang dikembangkan dalam konteks sosial-budaya yang berbeda. Pentingnya tokoh agama, tradisi musyawarah, dan legitimasi sosial dalam komunikasi politik menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia memiliki karakteristik unik yang memerlukan pendekatan teoretis yang kontekstual. Hal ini membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut dalam mengembangkan teori komunikasi politik yang lebih sesuai dengan konteks Indonesia.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi komunikasi politik anggota DPRD Kabupaten Jombang periode 2025-2029 dalam menyerap aspirasi publik menunjukkan kompleksitas fenomena komunikasi politik di tingkat lokal yang melibatkan dimensi struktural, individual, dan kontekstual. Pertama, perancangan strategi komunikasi politik dimulai dengan analisis situasional mendalam terhadap karakteristik konstituen dengan pendekatan hibrida yang menggabungkan kanal komunikasi tradisional dan modern, disesuaikan dengan keunikan sosial-budaya masyarakat Jombang yang berbasis pesantren. Implementasi diwujudkan melalui reses, dialog publik, dan pemanfaatan media sosial dengan pendekatan komunikasi yang adaptif sesuai karakteristik audiens. Evaluasi dilakukan melalui mekanisme sistematis yang meliputi rapat internal, pendokumentasian aspirasi terstruktur, dan umpan balik langsung dari masyarakat.

Kedua, identifikasi media dan kanal komunikasi mengungkapkan dua kategori utama yaitu formal-institusional dan informal-personal, dengan peningkatan signifikan pemanfaatan media digital khususnya WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Efektivitas kanal komunikasi bervariasi berdasarkan segmentasi masyarakat, dengan masyarakat pedesaan lebih responsif terhadap

komunikasi tatap muka dan pelibatan tokoh agama, sementara masyarakat perkotaan lebih mengandalkan media digital. Empat faktor determinan yang mempengaruhi efektivitas adalah aksesibilitas, responsivitas, kepercayaan dan legitimasi sosial, serta kesesuaian format dengan karakteristik aspirasi. Strategi multi-kanal yang mengintegrasikan berbagai media dan kanal terbukti merupakan pendekatan optimal dalam komunikasi politik.

Ketiga, kontribusi strategi komunikasi politik terhadap penguatan demokrasi partisipatif termanifestasi dalam lima dimensi: peningkatan partisipasi publik melalui saluran komunikasi yang aksesibel dan inklusif, pembentukan representasi politik yang lebih responsif, penguatan relasi sosial-politik melalui pendekatan kultural, peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik, dan peningkatan efektivitas kebijakan publik. Keunikan konteks lokal Kabupaten Jombang dengan tradisi pesantren yang kuat mensyaratkan pelibatan tokoh agama sebagai legitimasi sosial dalam proses komunikasi politik.

Beberapa rekomendasi strategis diajukan. Untuk anggota DPRD Kabupaten Jombang, direkomendasikan pengembangan kompetensi komunikasi politik melalui pelatihan sistematis yang mencakup penguasaan media digital, mempertahankan pendekatan komunikasi berbasis kultural dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat, konsistensi menjalankan strategi multi-kanal, dan peningkatan responsivitas terhadap aspirasi yang disampaikan. Untuk sekretariat DPRD, direkomendasikan pengembangan sistem manajemen aspirasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, penyediaan dukungan teknis dan administratif yang optimal dalam pengelolaan media sosial, pengembangan kapasitas staf dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta penyusunan standar operasional prosedur yang jelas untuk dokumentasi dan pelaporan hasil penyerapan aspirasi.

Untuk pemerintah daerah, direkomendasikan peningkatan investasi dalam infrastruktur komunikasi khususnya pemerataan akses internet, fasilitasi sinergi yang lebih kuat antara DPRD dengan berbagai stakeholder, pengembangan platform digital terintegrasi untuk komunikasi dengan masyarakat, dan alokasi anggaran yang memadai untuk program peningkatan literasi digital masyarakat.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan termasuk fokus pada satu lokasi penelitian dengan karakteristik spesifik, sehingga generalisasi ke daerah lain dengan karakteristik sosial-budaya berbeda memerlukan kehati-hatian. Penelitian lanjutan direkomendasikan untuk melakukan studi komparatif antar daerah dengan karakteristik sosial-budaya berbeda, penelitian lanjutan dengan pendekatan mixed methods yang menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif, kajian mendalam tentang adopsi teknologi komunikasi digital oleh anggota legislatif, dan eksplorasi penggunaan kerangka teoretis alternatif atau komplementer untuk memperkaya pemahaman tentang komunikasi politik di tingkat lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Jombang periode 2024-2029, tokoh masyarakat, tokoh agama, aktivis LSM, dan seluruh informan yang telah bersedia memberikan informasi dan waktunya untuk kepentingan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang atas dukungan administratif dan fasilitasi akses dokumen selama proses penelitian. Penghargaan khusus disampaikan kepada Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas dukungan akademis dan metodologis dalam penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, R. K., & Sjoraida, D. F. (2018). Dimensi sosial dalam pelayanan aspirasi masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat. **Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi**, 8(2), 145-160.
- Arrochmah, S., & Nasionalita, K. (2020). Pemanfaatan media sosial dalam meningkatkan komunikasi publik DPRD. **Jurnal Komunikasi Pembangunan**, 18(1), 67-82.
- Aswela, M. (2022). Strategi komunikasi politik berbasis kultural dalam penyerapan aspirasi masyarakat. **Jurnal Komunikasi Politik**, 12(3), 234-251.
- Biddle, B. J. (2013). **Role theory: Expectations, identities, and behaviors**. New York: Academic Press.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. **Qualitative Research Journal**, 9(2), 27-40.
<https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>

- Cangara, H. (2016). **Komunikasi politik: Konsep, teori dan strategi** (Edisi Revisi). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Chumaeson, A. (2021). Strategi komunikasi politik adaptif dalam konteks multikultur. **Indonesian Journal of Political Studies**, 5(2), 178-195.
- Creswell, J. W. (2014). **Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches** (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). **Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches** (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Dhofier, Z. (2019). **Tradisi pesantren: Studi pandangan hidup kyai dan visinya mengenai masa depan Indonesia** (Edisi Revisi). Jakarta: LP3ES.
- Elizamiharti, E., & Nelfira, D. (2023). Teknologi informasi dan partisipasi politik dalam era digital. **Jurnal Administrasi Publik**, 15(1), 89-104.
- Faridah, F., Suharyanto, A., & Effendi, R. (2024). Hambatan dan solusi dalam komunikasi politik di era kontemporer. **Journal of Political Communication**, 16(1), 45-67.
- Goni, M. G. H., Nayoan, S. J., & Liando, D. M. (2019). Penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD di Kabupaten Minahasa Selatan periode 2014-2019. **Journal of Governance and Public Policy**, 6(3), 412-428.
- Holilah, H., & Ismail, M. (2023). Model komunikasi reses anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat di Kabupaten Bangkalan. **Komunikasi Politik**, 11(2), 156-173.
- Katz, D., & Kahn, R. L. (2018). **The social psychology of organizations** (2nd ed.). New York: Wiley.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). **InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing** (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Lasswell, H. D. (1948). The structure and function of communication in society. In L. Bryson (Ed.), **The communication of ideas** (pp. 37-51). New York: Harper and Brothers.

- Maulansyah, D. M. (2025). Strategi komunikasi politik pimpinan Komisi I DPRD Sumedang dalam optimalisasi fungsi legislatif dan representasi aspiratif. **Jurnal Studi Legislatif**, 13(1), 23-45.
- McNair, B. (2011). **An introduction to political communication** (5th ed.). London: Routledge.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). **Qualitative research: A guide to design and implementation** (4th ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). **Qualitative data analysis: A methods sourcebook** (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Noviyati, K. (2020). Komunikasi politik anggota DPRD dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat: Studi komunikasi politik pada DPRD Jawa Timur Dapil I. **Jurnal Komunikasi Massa**, 14(2), 189-206.
- Patton, M. Q. (2015). **Qualitative research and evaluation methods** (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Pitkin, H. F. (1967). **The concept of representation**. Berkeley: University of California Press.
- Ramadhan, A. (2017). Peran DPRD dalam mendorong partisipasi masyarakat melalui komunikasi publik di Kabupaten Sleman. **Jurnal Pemerintahan Daerah**, 9(2), 134-151.
- Shenton, A. K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. **Education for Information**, 22(2), 63-75.
- Sundari, L. (2018). Transparansi layanan penyampaian aspirasi masyarakat pada DPRD. **Jurnal Administrasi Negara**, 12(3), 267-284.
- Syarifuddin, A., Rahmat, H., & Mustanir, A. (2024). Model komunikasi kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. **Jurnal Komunikasi Pembangunan**, 22(1), 45-62.
- Yahya, M., Abdullah, I., & Saleh, S. (2022). Komunikasi politik anggota DPRD Kabupaten Sinjai dalam menyerap aspirasi rakyat di masa pandemi COVID-19. **Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik**, 3(2), 156-174.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.